

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURABAYA (STUDI KECAMATAN BUBUTAN)

Nisa Andita Putri , Suprayoga

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

nisaanditaputri@gmail.com¹, suprayoga@uwp.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis upaya dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Surabaya dan (2) Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan stunting di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Jenis penelitian ini deskriptif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Lokasi penelitian di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Fokus Penelitian terhadap implementasi kebijakan stunting di Kecamatan Bubutan. Sumber data primer dikumpulkan melalui observasi, dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Keabsahan data diperiksa dengan menggunakan triangulasi dengan mengadakan pengecekan data yang dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan stunting di Kecamatan Bubutan dilakukan secara optimal ditinjau dari indicator implementasi yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Serta faktor penghambat dan pendukung yang bisa dilihat dari internal dan eksternal.

Kata Kunci: Stunting, Implementasi Kebijakan, Kecamatan Bubutan

Abstract

This study aims (1) to analyze efforts in implementing stunting reduction policies in the city of Surabaya and (2) to analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of stunting policies in the city of Surabaya. This study uses the policy implementation theory of George C. Edward III. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. Data collection techniques through observation and interviews. The research location is in Bubutan District, Surabaya City. Research focus on the implementation of the stunting policy in Bubutan District. Primary data sources were collected through observation and interviews, as well as secondary data obtained through library research. The validity of the data is checked using triangulation. The results showed that the implementation of the stunting policy in Bubutan District was carried out optimally in terms of implementation indicators namely communication, resources, attitude of implementers, and bureaucracy. As well as inhibiting and supporting factors that can be seen from internal and external.

Keywords: Stunting, Policy Implementation, Bubutan District

Pendahuluan

Stunting menjadi masalah yang krusial, kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. *Stunting* adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan sesuai umur (PB/U) atau tinggi badan berdasarkan usia (TB/U) dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/*stunted*) dan <-3 SD (sangat pendek/*severely stunted*) (Nabila Udzrotu Shauma, Dini Gandini Purbaningrum, 2022). Dapat dikatakan *stunting* adalah masalah kronis yang terjadi sejak masa hamil hingga anak usia dibawah 2 tahun dimana kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi dari standar median yang telah ditetapkan oleh WHO.

Di Indonesia, kebijakan pencegahan *stunting* telah diatur dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu seperti Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang terdapat dalam Bab VIII tentang Gizi. Didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada upaya memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran perilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan, meningkatkan ketercapaian sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan.

Selain diatur dalam UU Kesehatan, kebijakan terkait pencegahan *stunting* juga diatur dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Namun sejalan berjalannya waktu, peraturan ini dinilai belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti. Pada tahun 2021, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (selanjutnya disebut Perpres No. 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan *Stunting*) yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*.

Selanjutnya dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan *Stunting*, menyatakan bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas, dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan pemangku kepentingan. Berdasarkan data yang dihasilkan dari hasil survey Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* yang terjadi pada balita tercatat sebesar 21,6% pada tahun 2022. Angka pravalensi *stunting* di Indonesia ini masih lebih tinggi dibandingkan

toleransi maksimal angka stunting yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (selanjutnya disebut WHO). Selanjutnya pada tahun 2023 untuk sementara prevalensi stunting menurun menjadi 17,8% menurut data yang dilaporkan bulan Februari 2023 (Syarifah Liza Munira, 2023).

Di Jawa Timur, prevalensi stunting mengalami penurunan dari 2021 yang semula sebesar 23,5% menjadi 19,2% pada tahun 2022 (Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022). Hal ini juga menunjukkan bahwa provinsi Jawa Timur juga berupaya dalam pencegahan stunting. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memfokuskan pembahasan yang lebih khusus terkait pencegahan stunting di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur.

Data Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebelumnya menyebut angka stunting di dari tahun 2020 terdapat 12.788 kasus stunting di Surabaya yang kemudian turun pada Oktober 2021 ada 5.727 kasus, namun, tidak sampai akhir 2021, jumlah stunting mampu diatasi hingga turun menjadi 1.785 kasus. Bahkan, pada Januari 2023, jumlah kasus stunting di Surabaya turun menjadi 889. Selain itu, Surabaya menjadi kota dengan angka stunting terendah secara nasional. Capaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Hal itu mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Surabaya tercatat di level 4,8%. Di mana secara nasional rata-rata stunting masih berada di level 21%. Adapun bila berdasarkan bulan penimbangan serentak, prevalensi stunting di Surabaya pada 2022 hanya tinggal 1,22%. Hal tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh dari kebijakan stunting yang diberlakukan di Surabaya.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Qualitative Research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, penelitian ini membahas tentang objek yang alamiah sesuai dengan apa yang telah terjadi maupun belum terjadi di lapangan (Hardani, 2020). Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya tepatnya pada Kecamatan Bubutan. Salah satu alasan yang mendasari peneliti mengambil lokasi penelitian di lokasi tersebut adalah Pemerintah Kecamatan Bubutan Surabaya memiliki beberapa program yang dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting di wilayah Kecamatan Bubutan Surabaya. Dengan menggunakan pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan menurut George Edward III terdapat 4 faktor yakni (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Sikap Pelaksana; dan (4) Struktur Birokrasi.

Hasil dan Pembahasan

Kota Surabaya sebagai kota/kabupaten dengan kasus stunting tertinggi ke-6 di Jawa Timur dengan persentase 28.90% masih berada di atas rata-rata kasus Jawa Timur yaitu 23.50% (SSGI, 2021) terus berupaya megentaskan kasus stunting di tingkat kota. Pada bulan Juli tahun 2022, tercatat ada 6.722 kasus stunting aktif di Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2022).

Oleh sebab itu salah satu upaya yang dijalankan pemerintah Kota Surabaya saat ini dalam mengatasi masalah stunting dilakukan dengan cara koordinasi antar lembaga pemerintah. Hal tersebut merupakan cara yang strategis dalam mencapai tujuan yang diinginkan, mengingat kejadian stunting disebabkan oleh berbagai aspek. Adapun keterlibatan multi sektoral tersebut terdiri dari sektor kesehatan, ketersediaan pangan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, serta jaminan social.

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah beserta organisasi non Pemerintah berupa anggaran dan kegiatan sosialisasi dalam menekan kasus stunting di Kota Surabaya. Pada kegiatan sosialisasi ini dilakukan ke beberapa Kelurahan dan bekerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah Kota Surabaya cukup sukses dalam menurunkan kasus stunting, Karena jajaran instansi yang ikut serta membantu dalam memberikan solusi atas penekanan masalah stunting di Kota Surabaya Maka dari itu, Kota Surabaya cukup efektif dalam memberikan program-program yang berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Selanjutnya menurut pasal 21 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengatur Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Berdasarkan pasal tersebut penulis telah bertemu dengan Ibu Fitria dan Ibu Suharti yang merupakan orang-orang yang bertugas sebagai TPK (Tim Pendamping Keluarga) dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kecamatan Bubutan, Ibu Dra. Eni Sri Endah Jekti, MM (Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian), dan Dra Emi Saraswati (penyuluhan KB).

Dari hasil pertemuan wawancara tersebut penulis dapat menarik hasil penelitian terkait implementasi kebijakan penurunan stunting yang dilakukan di Kecamatan Stunting yang didasarkan pada Teori implementasi kebijakan publik yaitu Teori Edward III. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Dra. Eni Sri Endah Jekti, MM di Kecamatan Bubutan pada tanggal 10 Agustus 2023 menjelaskan bahwa:

“Di Tahun 2023 ini tidak ada peningkatan angka stunting di Kota Surabaya khususnya Kecamatan Bubutan ini, karena kita secara rutin melakukan sosialisasi kepada warga di kecamatan atau kelurahan setempat terkait program penurunan stunting. Misalnya seperti program catin (calon pengantin), SOTH atau sekolah orang tua hebat, dan program-program lain yang juga bertujuan untuk menurunkan angka stunting.”

“Selain itu untuk berkoordinasi dengan pemerintahan kota pusat dengan kecamatan dilakukan dengan jelas, kemudian dari kecamatan dan puskesmas juga melakukan komunikasi yang dilakukan dengan mendata melalui data posyandu terkait anak-anak yang terkena stunting.”

Informan Ibu Suharti menambahkan:

“Kita mengumpulkan data terkait anak yang terkena stunting yang bisa dilihat di Kecamatan. Selain itu lalu kita juga memiliki program sayang warga untuk melaporkan anak yang terkena stunting.”

Informan Ibu Eni menambahkan:

“Selain program yang dibentuk oleh Dinas, ada juga program yang dibentuk dengan kerjasama dengan swasta yaitu Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN). Program tersebut bernama BESTIE atau bersama tetangga pasti sejahtera. Program ini membantu banyak tidak hanya stunting tetapi untuk lansia yang kekurangan makanan tapi dana lebih banyak di fokuskan ke stunting untuk membeli susu, vitamin, dan makanan sehat bergizi untuk anak stunting.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur komunikasi telah dilaksanakan dengan baik dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Surabaya. Transmisi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi yang terjadi antara pemerintah di Kecamatan Bubutan dan warga mampu menjamin bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat yang dibuktikan dengan menurunnya angka stunting dari tahun

2022 ke tahun 2023 yang mulanya terdapat 34 kasus menjadi 26 kasus per Agustus 2023. Selain itu komunikasi yang dilakukan antara pejabat pemerintahan, pemerintah daerah dengan swasta, serta pemerintah dengan masyarakat juga dilakukan dengan baik yang bisa dilihat dari terlaksananya program-program penurunan stunting di Kecamatan Bubutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi sudah berjalan optimal.

b. Sumber Daya

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Dra. Eni Sri Endah Jekti, MM di Kecamatan Bubutan pada tanggal 10 Agustus 2023 menjelaskan bahwa:

“Terkait sumber daya khususnya sumber daya manusia, kami sudah menyiapkan dan mencukupi semua yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program-program penurunan stunting. Pelaksanaan program stunting didukung oleh tenaga di luar kesehatan seperti kader penyuluhan dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk rincian jumlah kader TPK sudah mencukupi dimana masing-masing RW terdapat 9 orang yang terbagi menjadi 3 tim. Tiap tim masing-masing terdapat 1 orang tenaga kesehatan, 1 orang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan 1 orang Keluarga Berencana (KB)”

“Anggaran dari program-program stunting ini dari APBD, tetapi juga ada sumbangan dana diluar APBD yang rinciannya tidak bisa kami sebutkan.”

Informan Ibu Suharti menambahkan:

“Dari segi sarana dan prasarana, kita juga memberikan penyuluhan dan juga pelayanan. Contohnya pada program Catin, langkah awal pertama cek kesehatan lalu mengikuti program catin yang akan di temani oleh TPK (tim pendamping keluarga). Mereka ini nanti yang membantu para catin mulai dari cek kesehatan lalu iku penyuluhan secara virtual jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti dan setelah itu mereka di beri sertifikat baru bisa mendaftar di KUA. Yang memfasilitas sertifikat itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3PKK).”

Informan Ibu Suharti menambahkan:

“Kalau ada anak yang terkena stunting akan kita perhatikan dengan betul

mulai dari kesehatannya dan juga kalau anak tersebut mempunyai penyakit bawaan juga kita perhatikan dan membantu agar anak tersebut mendapat pelayanan kesehatan dengan baik. Oleh karena itu orang tua dan ibu juga perlu pemahaman dan kita berikan konseling kesehatan gizi di Posyandu setempat.”

Informan Ibu Eni menambahkan:

“Kita juga memiliki aplikasi Sayang Warga terkait data seluruh warga Kota Surabaya. Dalam satu RT saya bisa tahu apakah ada atau tidak balita yang mengalami gejala stunting, dan berapa jumlah ibu hamil”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya anggaran. Selain itu berdasarkan dengan apa yang disampaikan Informan Ibu Suhari bahwa sumber daya juga dilakukan dengan baik yang bisa dilihat bahwa para pejabat pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan ikut terjun langsung untuk menangani anak yang terkena stunting. Dari pelaksanaan program-program penurunan stunting diketahui bahwa anggarannya berasal dari APBD, namun juga terdapat bantuan dana diluar APBD.

Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat juga masih ada yang tidak mengikuti program pencegahan stunting yang dibentuk oleh pemerintah setempat.

c. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana atau disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Dra. Eni Sri Endah Jekti, MM di Kecamatan Bubutan pada tanggal 10 Agustus 2023 menjelaskan bahwa:

“Kita sangat memperhatikan warga terhadap penurunan stunting, misalnya pada program Catin, pada proses sejak menjadi Catin, kemudian ibu hamil sampai nifas (bayi 0-6bulan), menjadi baduta dan balita, di masa-masa tersebut pemerintah benar-benar memperhatikan dan peduli terhadap warga negara Indonesia khususnya untuk pencegahan stunting. Selain itu pada program BESTIE, program ini membantu banyak tidak hanya stunting tetapi untuk lansia yang kekurangan makanan tapi dana lebih banyak di fokuskan ke stunting untuk membeli susu, vitamin, dan makanan sehat bergizi untuk anak stunting”

Selain itu Informan Ibu Fitriia menambahkan:

“Untuk program catin ini para calon pengantin diwajibkan mempunyai sertifikat dahulu baru bisa menikah. Untuk prosedur awalnya itu akan dicek kesehatan lalu mengikuti program catin yang nantinya akan ditemani oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga).”

Informan Ibu Imah sebagai masyarakat menjelaskan:

“anak saya terkena stunting saat pandemic, saat itu pada masa kehamilan awal saya kurang tahu bahayanya stunting dan bagaimana cara pencegahannya karena saya jarang ikut penyuluhan. Awal menikah saya tidak ikut bimbingan pernikahan dan tidak mendapatkan sertifikat. Karena kondisi ekonomi juga saya kurang memberikan makanan yang bergizi ke anak saya.”

“Lalu saya coba bawa ke Puskesmas dan Alhamdulillah sejak bayi saya terkena stunting diberikan pelayanan sampai sekarang anak saya sudah pra stunting.”

Informan Ibu Ani sebagai masyarakat menjelaskan:

“Stunting itu kan kekurangan gizi insyaAllah anakku nggak terkena stunting karena umurnya masih baru 3 tahun. Dia juga aktif jalan kemana-mana karena itu sedang sulit makannya dan aku ganti makan roti, kacang hijau. Orang itu harus sering-sering cari tahu, googling mengenai stunting dan sosialisasi ke rumah sakit atau kemana, kalau disini bisa langsung konsultasi ke Puskesmas”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur sikap pelaksana atau disposisi cukup terpenuhi. Pada proses perempuan dan laki-laki menjadi Catin, salah satu fokus dalam pendampingan catin adalah meningkatkan pemenuhan gizi Catin untuk mencegah kekurangan energi kronis dan anemia sebagai salah satu risiko yang dapat melahirkan bayi stunting. Seperti diketahui, tingginya angka anemia dan kurang gizi pada remaja putri sebelum menikah sampai pada saat perempuan itu hamil berpotensi menghasilkan anak stunting. Oleh karena itu pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum menikah. Hal ini dilakukan dengan alasan apabila ditemukan ketidaknormalan (kondisi patologis) bagi calon isteri maka dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk memperbaiki kondisi patologis tersebut. Kemudian pada anak khususnya baduta dan balita dilakukan penyediaan makanan bergizi seimbang sesuai dengan kondisi pertumbuhan anak; dan pengenalan makanan seimbang dan faktor terkait stunting lainnya. Selain itu berdasarkan informasi dari wawancara dengan masyarakat bahwa ketika ada bayi yang terkena stunting, Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan sampai melewati pra stunting. Hal ini berarti Pemerintah sangat memperhatikan penurunan stunting mulai dari penyuluhan kepada calon

pengantin sampai pada bayi yang terkena stunting.

Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Fitria di Kecamatan Bubutan pada tanggal 10 Agustus 2023 menjelaskan bahwa:

“Kota Surabaya menerapkan program catin (calon pengantin), SOTH atau sekolah orang tua hebat, dan program-program lain yang juga bertujuan untuk menurunkan angka stunting. Selain itu, kita juga memiliki aplikasi Sayang Warga terkait data seluruh warga Kota Surabaya. Dalam satu RT saya bisa tahu apakah ada atau tidak balita yang mengalami gejala stunting, dan berapa jumlah ibu hamil”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur birokrasi dalam implementasi kebijakan stunting sudah dilaksanakan dengan optimal. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam Pasal 7 ayat 3 huruf c dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting terdiri atas kegiatan prioritas yang salah satunya merupakan kegiatan pendampingan semua calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS). Selain itu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya Bahwa dari hasil wawancara diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Bubutan menerapkan program catin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentunya dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seperti terdapat faktor internal dan juga eksternal. Dalam hal ini dapat disebutkan:

a. Faktor Internal

Faktor internal di dalam rumah anak sendiri perlu diperhatikan perawatan anak yang baik, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang optimal, keadaan ibu, kondisi rumah, kualitas makanan yang rendah, keamanan makanan dan air, dan infeksi. Banyak penelitian tentang faktor risiko stunting telah dilakukan di Indonesia. Risiko keterikatan dapat dimulai pada saat pembuahan, yaitu faktor ibu. Ibu yang kurang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sejak hamil hingga melahirkan berperan besar menimbulkan stunting pada anak yang dilahirkannya. Pada saat hamil, layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), Post Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu setelah melahirkan), dan pembelajaran dini yang berkualitas juga sangat penting. Hal ini terkait dengan konsumsi suplemen zat besi yang memadai saat hamil, pemberian Air Susu Ibu eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang optimal.

Beberapa ciri-ciri bahwa seorang anak mengalami keterlambatan pertumbuhan antara lain lebih pendek dari biasanya (*dwarfisme*) atau dari anak seusianya. Periode 0-24 bulan merupakan periode yang menentukan kualitas hidup, oleh karena itu periode ini disebut periode emas. Waktu ini adalah waktu yang sensitif karena akibatnya bagi bayi bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Karena itu, perlu menjaga nutrisi yang tepat pada usia ini.

b. Faktor Eksternal

Suatu negara dan masyarakat di dalamnya berperan dalam menimbulkan kondisi stunting pada anak-anak di negara tersebut. Berbagai keadaan yang dapat menjadi faktor eksternal yang dapat menjadi pendukung dan penghambat penurunan stunting seperti:

1. Pendidikan

Salah satu faktor yang penting adalah pendidikan bagi calon pengantin atau catin dan juga orang tua sebagai upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah bayi stunting.

2. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya stunting. Para ibu hamil akan melakukan cek kehamilan sebanyak 6 kali dan 2 kali di antaranya diperiksa oleh dokter, konsumsi gizi seimbang sesuai porsinya, meminum tablet tambah darah, mengikuti kelas ibu hamil, melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya ini sangat diperlukan, mengingat stunting akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa. Sehingga dengan memberikan perhatian yang tepat pada kesehatan ibu hamil, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya stunting pada anak.

3. Keadaan ekonomi

Ketersediaan pangan merupakan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup baik segi kuantitas dan kualitas dan keamanannya. Kurang tersedianya pangan dalam suatu keluarga secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya penyakit akibat kurang gizi pada keluarga. Status ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan orang tua dan jumlah anggota keluarga. Status ekonomi keluarga akan mempengaruhi kemampuan pemenuhan gizi keluarga maupun kemampuan mendapatkan layanan kesehatan. Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih berisiko mengalami stunting karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi

4. Kondisi air, sanitasi, dan lingkungan

Sanitasi dan Akses Air Bersih termasuk dalam hal ini adalah akses sanitasi dan air bersih yang rendah, bisa mendekatkan anak pada risiko ancaman

penyakit infeksi, salah satunya adalah diare. Diare dapat menyebabkan anak tidak mempunyai nafsu makan sehingga terjadi kekurangan jumlah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya yang dapat menyebabkan gizi kurang. Jadi dari sini terlihat terdapat interaksi antara infeksi dan konsumsi makanan yang kurang merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Untuk itu, perlu upaya untuk meningkatkan akses sanitasi dan air bersih dengan cara membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan.

Penutup

Adapun berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan, peneliti menarik kesimpulan diantaranya:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh para pemerintah di Kecamatan Bubutan sudah dilakukan cukup baik. Transmisi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi yang terjadi antara pemerintah di Kecamatan Bubutan dan warga mampu menjamin bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat dibuktikan dengan menurunnya kasus stunting dari tahun ke tahun.
2. Sumber daya telah dipenuhi didasarkan pada sumber daya manusia mulai dari penyediaan tenaga di luar kesehatan seperti kader penyuluhan dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), sumber daya sarana dan prasarana yang dipenuhi berdasarkan tersedianya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada setiap wilayah setempat dan pembentukan aplikasi sayang warga. Terkait sumber daya anggaran berasal dari APBD dan swasta.
3. Sikap pelaksana atau disposisi sudah cukup terpenuhi yang dibuktikan dengan sikap pelaksana dari pemerintah yang cepat dan tanggap dalam melakukan upaya penurunan stunting melalui pendampingan kepada calon pengantin hingga anak yang terkena stunting akan dipantau dan diberikan pelayanan kesehatan.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan stunting sudah dilaksanakan dengan optimal atas terlaksananya program-program penurunan stunting seperti Catin, SOTH, dan BESTIE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Walikota Surabaya No 79 Tahun 2022 tentang Penurunan Stunting.
5. Faktor internal ini yang banyak mempengaruhi kenaikan angka stunting. Tidak semua calon pengantin atau catin maupun orang tua teredukasi dengan baik. Karena dibutuhkan kesadaran diri dari para perempuan maupun calon pengantin terkait bahaya stunting.
6. Faktor eksternal sudah berjalan dengan optimal. Di Kota Surabaya khususnya Kecamatan Bubutan ini dari segi ekonomi, pendidikan, lingkungan dan pelayanan kesehatan sudah dipenuhi dan dilakukan dengan baik dan maksimal.

Daftar Pustaka

- Abdul W., Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Mode Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agung A., 2018, *Pengaruh Kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pemilihan Gubernur Dan Wkll Gubernur Sumatera Utara Periode 2013 – 2018)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Dian Rosa Sunaryo, Candradewini, Ria Arifianti, 2021, Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung, *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, Volume 4 Nomor 4.
- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Iwan A., 2017, *Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang 1 Syariat Islam di Kota Langsa*”, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area
- Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Muhammad Ruslan R, 2022, *Manajemen Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menekan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Gora*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar
- Nabila U.S., Dini G. P., 2022, *Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi*, Vol. 13, No.2
- Noeng M., 2000, *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin
- Syarifah L. M., 2023, *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia